

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Padang merupakan masalah klasik yang masih sulit untuk di atasi sampai saat ini. Banyaknya jumlah sampah perharinya menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Padang. Berbagai pendekatan dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah kota Padang untuk mengatasi permasalahan sampah. Salah satu kebijakan yang menarik dan terbukti dapat mengatasi pengelolaan sampah adalah didirikannya Bank Sampah. Keberadaan Bank Sampah yang cukup terkenal adalah di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Menariknya, pengelolaan bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo melibatkan beberapa aktor terkait. Hal ini merujuk kepada konsep *collaborative governance* dalam proses pengelolaan bank sampah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa *collaborative governance* merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kolaborasi antar aktor dalam sebuah proses pemerintahan atau pun kebijakan. *Collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo melibatkan peran serta masyarakat, keberadaan pemerintah dalam hal ini pemerintah kota padang, serta juga keberadaan pihak swasta dan kehadiran dana CSR dari PT. PLN sendiri.

Kolaborasi antara masyarakat di Kelurahan Pasia Nan Tigo dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang serta pihak PLN menghasilkan pengelolaan bank sampah yang maksimal. Pemanfaatan dana Pokir dari Andre Rosiade kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk memaksimalkan pengelolaan bank sampah serta ditunjang oleh keberadaan dana CSR dari PLN. Kolaborasi antar aktor yang menghasilkan keaktifan dari bank sampah merupakan kunci dari terlaksananya program bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Sesuai dengan konsep *collaborative governance* dilihat kepada proses pengelolaan bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo terdapa lima aspek, diantaranya; 1) *Face to Face Dialogue*, 2) *Comment*

Building, 3) *Trush Building*, 4) *Shared Understanding*, dan 5) *Intermediate Outcomers*. Kelima aspek ini sangat kelihatan terlaksana dalam setiap proses yang dilakukan sebagai wujud dari kolaborasi antar aktor tersebut.

Pemerintah Kota Padang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup berperan serta sebagai perantara antara pihak PLN dan bank sampah. Dinas lingkungan hidup turut melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak PLN dan bank sampah sehingga menghasilkan kolaborasi yang aktif. Begitupun juga dengan keberadaan PLN dalam memberikan dana CSR guna menunjang operasional bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Tidak luput juga keberadaan masyarakat yang ikut menunjang dalam pemanfaatan bank sampah dan kesadaran akan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sehingga dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, PLN dan pihak bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo menjadi inti dalam proses pengelolaan sampah. Sehingga keberadaan kolaborasi dalam memanfaatkan bank sampah terbukti mengatasi permasalahan sampah di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan *collaborative governance* terbukti efektif dalam memanfaatkan keberadaan bank sampah sebagai bentuk kebijakan atas pengelolaan sampah di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

6.2 Saran

Penelitian ini berfokus kepada aspek *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Sebagai kebijakan dalam pengelolaan bank sampah yang ada di Kota Padang seharusnya sudah menjadi perhatian bersama mengenai efektivitas dari keberadaan bank sampah ini. Selain itu juga perlunya peninjauan lebih lanjut mengenai pengelolaan bank sampah dalam skala besar, yaitu kota Padang sendiri. Konsep *collaborative governance* sendiri memberikan landasan awal mengenai kolaborasi yang aktif antar aktor

yang terlibat. Untuk itu diperlukan analisis yang lebih jauh oleh peneliti selanjutnya, terutama kepada sejauhmana pemerintah, masyarakat

